



Katalog BPS : 3201002.5103

DISTRIBUSI PENDAPATAN & KETENAGAKERJAAN KABUPATEN BADUNG TAHUN 2009



**BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BADUNG
BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN BADUNG**

DISTRIBUSI PENDAPATAN DAN KETENAGAKERJAAN KABUPATEN BADUNG TAHUN 2009

ISBN : 979.473.100.5

No. Publikasi : 51032.002

Katalog BPS : 3201002.5103

Ukuran Buku : 21 cm x 29 cm

Jumlah Halaman : 43 + viii Halaman

Naskah : Seksi Statistik Sosial

Penyunting : Seksi Statistik Sosial

Diterbitkan oleh :

Badan Pusat Statistik Kabupaten Badung

Jln. Mulawarman No. 11, Telp (0361) 437519, Fax (0361) 411887,

Denpasar 80111

E-mail : bps5103@telkom.net

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya

SAMBUTAN KEPALA BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BADUNG

Om Swastyastu

Saya menyambut gembira dengan terbitnya publikasi Distribusi Pendapatan dan Ketenagakerjaan Kabupaten Badung Tahun 2009 untuk mendukung kelengkapan dan monitoring perencanaan pembangunan di Kabupaten Badung.

Kajian seperti ini sangat berguna dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan yang diharapkan lebih terarah. Secara makro, informasi ini juga sangat bermanfaat dalam pengambilan kebijakan sektoral maupun regional.

Indikator ini dapat memberi petunjuk secara kuantitatif tentang sejauh mana hasil-hasil pembangunan selama ini dapat dirasakan oleh masyarakat.

Pada kesempatan ini kami sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi memberikan data sehingga publikasi ini dapat diwujudkan.

Semoga publikasi ini dapat bermanfaat secara optimal dalam pengkajian pembangunan maupun penelitian lebih detail bagi konsumen data.

Om, Shantih, Shantih, Shantih, Om.

Mangupura, September 2010

Kepala Bappeda Litbang

Kabupaten Badung

I Wayan Suambara, SH, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19631025 198810 1 002

KATA PENGANTAR

Om Swastyastu

Puji syukur kami panjatkan ke hadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa / Tuhan yang Maha Esa atas rahmatnya penyusunan publikasi Distribusi Pendapatan dan Ketenagakerjaan Kabupaten Badung Tahun 2009 telah dapat diselesaikan tepat waktu.

Publikasi ini merupakan salah satu kajian ekonomi makro untuk dapat menjelaskan disparitas hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai. Publikasi ini mengungkapkan beberapa perbedaan yang terjadi antar wilayah karena adanya perbedaan struktural maupun perbedaan geografis yang menguntungkan.

Disadari masih terjadi beberapa kelemahan dalam analisa data karena kurang mendalamnya analisis yang ada, untuk itu kritik dan saran untuk perbaikan ke depan kami terima dengan senang hati.

Kepada semua pihak yang telah membantu terbitnya publikasi ini kami sampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Semoga buku ini ada manfaatnya.

Om, Shantih, Shantih, Shantih, Om

Badung, September 2010
Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Badung

Ir. I GDE SUARSA, M.Si
NIP. 19550628 197903 1 002

DAFTAR ISI

Sambutan Kepala Bappeda Litbang	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	vi
Daftar Gambar	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	3
1.3. Ruang Lingkup	3
BAB II METODOLOGI	4
2.1. Kerangka Sampel	4
2.2. Rancangan Sampel	5
2.3. Metode Pengumpulan Data	5
2.4. Konsep dan Definisi	6
BAB III KONSEPSI TEORITIS	10
3.1. Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan	10
3.2. Beberapa Aspek Ketimpangan Distribusi Pendapatan	13
3.3. Ukuran Distribusi Pendapatan	15
a. Koefisien Gini/ <i>Gini Ratio</i>	15
b. Kriteria Bank Dunia	16
3.4. Ketenagakerjaan	17
BAB IV POLA KONSUMSI	20
4.1. Pengeluaran Perkapita	20
4.2. Pola Konsumsi	21

a. Konsumsi Makanan	25
b. Konsumsi Non Makanan	28
BAB V DISTRIBUSI PENDAPATAN	31
BAB VI KETENAGAKERJAAN	35
6.1. Gambaran Umum Ketenakerjaan	35
6.2. Profil Penduduk Yang Bekerja	36
6.3. Profil Pengangguran Terbuka	40
BAB VII KESIMPULAN	42

<http://badungkab.bps.go.id>

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Rata-rata Pengeluaran Perkapita Penduduk Kabupaten Badung Menurut Klasifikasi Daerah, Tahun 2006 - 2009	21
Tabel 2.	Pola Konsumsi Penduduk Kabupaten Badung Menurut Jenis Pengeluaran, Tahun 2006 - 2009	22
Tabel 3.	Proporsi Pengeluaran Penduduk Kabupaten Badung Menurut Kelompok, Jenis Pengeluaran dan Klasifikasi Daerah, 2009	23
Tabel 4.	Pola Konsumsi Penduduk Kabupaten Badung Menurut Jenis Pengeluaran dan Klasifikasi Daerah, Tahun 2006 - 2009	24
Tabel 5.	Persentase Pengeluaran Perkapita Sub Kelompok Makanan Menurut Klasifikasi Daerah di Kabupaten Badung, 2009.....	26
Tabel 6.	Persentase Rata-rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Untuk Sub Kelompok Makanan Menurut Jenis Komoditi dan Golongan Pengeluaran Perkapita Sebulan di Kabupaten Badung, 2009	27
Tabel 7.	Proporsi Pengeluaran Perkapita Sub Kelompok Makanan Menurut Klasifikasi Daerah di Kabupaten Badung, 2009.....	29
Tabel 8.	Persentase Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Untuk Sub Kelompok Non Makanan Menurut Jenis Komoditi dan Golongan Pengeluaran Perkapita Sebulan di Kabupaten Badung, 2009	30
Tabel 9.	Perkembangan Nilai <i>Gini Ratio</i> Kabupaten Badung Tahun 2005 - 2009 ...	31
Tabel 10.	Distribusi Pendapatan Kabupaten Badung Berdasarkan Kriteria Bank Dunia, Tahun 2005 – 2009	33
Tabel 11.	Ketimpangan Pendapatan Antara Daerah Perkotaan dan Perdesaan Di Kabupaten Badung, Tahun 2008 – 2009	34
Tabel 12.	Kondisi Ketenagakerjaan Kabupaten Badung, 2007 – 2009	35

Tabel 13.	Jumlah Penduduk Kabupaten Badung Usia 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Utama, 2007 – 2009	37
Tabel 14.	Jumlah Penduduk Kabupaten Badung Usia 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan, 2007 – 2009	38
Tabel 15.	Jumlah Penduduk Kabupaten Badung Usia 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja, 2007 – 2009	39
Tabel 16.	Jumlah Penduduk Kabupaten Badung Usia 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Status Dalam Pekerjaan Utama, 2007 – 2009	39
Tabel 17.	Jumlah Penduduk Kabupaten Badung Usia 15 Tahun Ke Atas Yang Menganggur Menurut Tingkat Pendidikan, 2007 – 2009	41

<http://badungkab.bps.go.id>

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kurva Lorentz	16
Gambar 2. Karakteristik Pengeluaran Penduduk Badung, 2009	24
Gambar 3. Proporsi Pengeluaran Untuk Konsumsi Makanan Penduduk Kab. Badung, Tahun 2009	25
Gambar 4. Proporsi Pengeluaran Perkapita Penduduk Kabupaten Badung Untuk Sub Kelompok Makanan, 2009	28
Gambar 5. Perkembangan <i>Gini Ratio</i> Kab. Badung, 2005 – 2009	32
Gambar 6. <i>Gini Ratio</i> dan Distribusi Pendapatan Kabupaten Badung, 2005 – 2009	34
Gambar 7. Penduduk Yang Bekerja Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur, 2009	36
Gambar 8. Pengangguran Terbuka Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur, 2009	40

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Seiring dengan perubahan persepsi mengenai hakekat pembangunan ekonomi, banyak pihak di negara-negara kaya maupun negara-negara miskin yang tidak lagi meyakini pertumbuhan ekonomi sebagai tujuan pembangunan nomor satu yang harus selalu dikejar-kejar dan diutamakan. Negara-negara maju mulai lebih menekankan pada “kualitas hidup” yang antara lain tercermin dalam kegiatan-kegiatan pelestarian lingkungan hidup. Pola pikir semacam ini didasari oleh kesadaran bahwa daya dukung bumi terbatas dan pada akhirnya tidak akan mampu menyangga tingkat pertumbuhan yang tinggi secara terus menerus tanpa menimbulkan malapetaka ekonomi dan sosial.

Di negara-negara miskin, perhatian utama terfokus pada dilema kompleks pertumbuhan versus distribusi pendapatan. Keduanya sama-sama penting, namun hampir selalu sangat sulit diwujudkan secara bersamaan. Pembangunan ekonomi mensyaratkan *Gross National Products* (GNP) yang tinggi, dan hal itu hanya bisa dicapai dengan memacu tingkat pertumbuhan ekonomi. Memacu tingkat pertumbuhan ekonomi secara cepat dilakukan dengan menggerakkan sektor-sektor ekonomi padat modal yang notabene dikuasai oleh kaum elit kaya raya yang minoritas. Sehingga hasilnya pun kurang dapat dinikmati oleh mayoritas rakyat miskin. Hal ini akan memperparah ketimpangan pendapatan dan meningkatkan jumlah kemiskinan absolut. Sebaliknya jika yang digerakkan adalah sektor-sektor ekonomi padat karya yang notabene digeluti oleh mayoritas rakyat miskin maka target pertumbuhan ekonomi secara agregat akan sulit dicapai.

Kini baik di negara-negara maju maupun negara-negara berkembang mulai muncul tuntutan untuk meninjau kembali tradisi “pengutamaan GNP” sebagai sasaran kegiatan ekonomi yang utama. Upaya pengentasan kemiskinan dan pemerataan pendapatan mulai dikedepankan sebagai fokus

utama pembangunan. Di Indonesia hal tersebut dilakukan melalui berbagai program diantaranya Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Inpres Desa Tertinggal (IDT), Program Keluarga Harapan (PKH), Jaring Pengaman Sosial (JPS) dan lain sebagainya. Meskipun demikian kesenjangan dan ketidakadilan hingga saat ini masih merupakan pekerjaan rumah yang belum dapat terselesaikan secara tuntas.

Mengukur pendapatan masyarakat bukanlah pekerjaan yang mudah, oleh karena itu Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan penghitungan pendapatan dengan menggunakan pendekatan pengeluaran/konsumsi masyarakat. Hal ini didasari oleh paradigma bahwa bila pendapatan mengalami kenaikan maka akan diikuti oleh berbagai kebutuhan yang semakin banyak sehingga menuntut pengeluaran yang semakin tinggi pula. Menurut Ernest Engel, "Bila selera tidak berubah maka persentase pengeluaran untuk makanan akan menurun seiring dengan meningkatnya pendapatan". Meningkatnya pendapatan masyarakat akan menggeser pola konsumsi masyarakat dari lebih banyak mengkonsumsi makanan menjadi lebih banyak mengkonsumsi bukan makanan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa apabila persentase pengeluaran masyarakat untuk makanan telah menurun dari tahun-tahun sebelumnya hal itu dapat menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat mulai mengalami peningkatan.

Di sisi lain ketenagakerjaan merupakan indikator perekonomian yang juga dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan suatu daerah. Indikator ketenagakerjaan yang sering digunakan antara lain adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Kondisi ketenagakerjaan suatu daerah dapat menggambarkan tingkat perkembangan perekonomian dan juga tingkat perkembangan kesejahteraan masyarakatnya. Gambaran ini sangat penting bagi perencana pembangunan, pengambil kebijakan maupun pemerhati masalah sosial ekonomi dan kependudukan.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Kajian ini bermaksud untuk mengetahui sejauh mana kemajuan pembangunan di Kabupaten Badung telah diikuti dengan distribusi pemerataannya serta mengetahui gambaran umum ketenagakerjaan di Kabupaten Badung pada tahun 2009.

Adapun tujuannya untuk mengungkapkan beberapa indikator ekonomi makro sebagai dasar perencanaan dan pengambilan kebijakan pembangunan di Kabupaten Badung. Secara spesifik publikasi ini mempunyai dua tujuan yaitu :

- a. Mengetahui pola konsumsi penduduk di Kabupaten Badung menurut klasifikasi daerah perkotaan dan pedesaan.
- b. Menghitung distribusi dan kesenjangan pendapatan penduduk Kabupaten Badung menurut klasifikasi daerah perkotaan dan pedesaan.
- c. Memberikan gambaran ketenagakerjaan di Kabupaten Badung dan menghitung indikator-indikator ketenagakerjaan untuk membantu pemerintah dalam mengambil kebijakan terutama yang berkaitan dengan ketenagakerjaan dan kesejahteraan masyarakat.

1.3. RUANG LINGKUP

Publikasi ini menggunakan data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional 2009 dan Survei Angkatan Kerja Nasional 2009. Survei ini dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia. Adapun sampel untuk Kabupaten Badung sebanyak 640 rumah tangga yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Badung.

BAB II

METODOLOGI

2.1. KERANGKA SAMPEL

Kerangka sampel Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) terdiri dari 3 jenis kerangka yaitu: kerangka sampel untuk pemilihan blok sensus, kerangka sampel untuk pemilihan sub blok sensus (khusus untuk blok sensus bermuatan lebih dari 150 rumah tangga) dan kerangka sampel untuk pemilihan rumah tangga.

Kerangka sampel blok sensus merupakan daftar blok sensus biasa hasil Sensus Ekonomi 2006 (SE06) yang dilengkapi dengan jumlah rumah tangga hasil Pendaftaran Pemilih dan Penduduk Berkelanjutan (P4B) yang dibedakan menurut daerah perkotaan dan perdesaan. Kerangka sampel rumah tangga merupakan daftar rumah tangga hasil pendaftaran rumah tangga menggunakan Daftar VSEN2009.L yang dibedakan menurut golongan pengeluaran.

Kerangka sampel yang digunakan dalam Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas 2009) adalah daftar blok sensus terpilih Sakernas 2007 berikut daftar nama kepala rumah tangga hasil *update* listing Agustus 2008 dan Februari 2009. Blok sensus sebagai *first stage sampling unit* dan rumah tangga sebagai *second stage sampling unit*. Blok sensus dalam kerangka sampel dapat dipilah menjadi dua kelompok, yaitu blok sensus terpilih untuk estimasi tingkat provinsi (periode pencacahan Februari 2009), dan blok sensus komplemen (periode pencacahan Agustus 2008 yang bukan merupakan blok sensus Pebruari 2009) yang bila ditambahkan kedalam blok sensus untuk estimasi provinsi dapat digunakan untuk estimasi tingkat kabupaten/kota. Kerangka sampel ini digunakan untuk periode pencacahan (Pebruari dan Agustus) dalam tahun 2008-2010. Untuk tahun 2011 dan seterusnya menggunakan kerangka sampel sensus penduduk (SP) 2010.

2.2. RANCANGAN SAMPEL

Rancangan penarikan sampel Susenas 2009 adalah rancangan penarikan sampel dua tahap (*two stage sampling*). Penarikan sampel untuk daerah perkotaan dan perdesaan dilakukan secara terpisah. Pada tahap pertama, dari *master sampling frame* (MSF) blok sensus biasa hasil SE06 dipilih sejumlah blok sensus secara *probability proporsional to size* (pps) dengan *size* banyaknya rumah tangga hasil P4B. Untuk blok sensus yang muatannya lebih dari 150 rumah tangga, maka perlu dilakukan pemilihan sub blok sensus secara pps-sistematik dengan *size* banyaknya rumah tangga hasil P4B. Listing dilakukan pada seluruh blok sensus/sub blok sensus terpilih. Selanjutnya dari setiap blok sensus terpilih kemudian dipilih sebanyak 16 rumah tangga dari hasil listing secara sistematik.

Untuk kegiatan Sakernas dilakukan pembentukan paket-paket blok sensus. Blok sensus dalam kerangka sampel yang digunakan untuk estimasi tingkat provinsi dibagi menjadi empat gugus sampel blok sensus yang berukuran sama dan tidak saling tumpang tindih (*non overleaping*) secara sistematik yang digunakan untuk kegiatan pencacahan pada bulan Februari setiap tahunnya, sedangkan kelompok blok sensus komplemen dibagi menjadi dua paket sampel yang digunakan sebagai blok sensus tambahan untuk kegiatan pencacahan pada bulan Agustus setiap tahunnya. Pembentukan gugus sampel blok sensus antara daerah perkotaan dan perdesaan dilakukan secara terpisah (*independent*). Pemutakhiran daftar rumah tangga (*update listing*) dilakukan di setiap periode pencacahan yang dilanjutkan dengan pemilihan rumah tangga sampel.

2.3. METODE PENGUMPULAN DATA

Pengumpulan data dari rumah tangga terpilih dilakukan melalui wawancara langsung dengan responden. Wawancara dibedakan menjadi dua tahap, yaitu tahap pertama menanyakan keterangan tentang rumahtangga kepada kepala rumah tangga atau anggota rumah tangga yang mewakilinya,

dan tahap kedua menanyakan keterangan individu kepada masing-masing anggota rumah tangga.

2.4. KONSEP DEFINISI

- a. Koefisien Gini/*Gini Ratio* adalah suatu nilai yang digunakan untuk mengukur tingkat pemerataan pendapatan suatu masyarakat/bangsa atau suatu daerah/negara. Semakin tinggi nilai *gini ratio* maka semakin timpang distribusi pendapatan di suatu daerah. Sebaliknya semakin rendah nilai *gini ratio* maka semakin merata pula distribusi pendapatannya.
- b. Kurva Lorenz didefinisikan sebagai kurva yang menunjukkan hubungan antara persentase kumulatif banyaknya rumahtangga/penduduk dan persentase kumulatif pendapatan yang diterima oleh berbagai lapisan masyarakat.
- c. Penduduk usia kerja didefinisikan sebagai penduduk yang berusia 15 tahun ke atas.
- d. Angkatan Kerja adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.
- e. Bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi.
- f. Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak putus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pula kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi.
- g. Punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja adalah keadaan dari seseorang yang mempunyai pekerjaan tetapi selama seminggu yang lalu sementara tidak bekerja karena berbagai sebab seperti sakit, cuti, menunggu panen, mogok kerja dan sebagainya.

- h. Pengangguran terbuka terdiri dari mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan dan mereka yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja (*An ILO Manual on Concepts and Methods*).
- i. Mencari pekerjaan adalah kegiatan seseorang yang tidak bekerja dan pada survei orang tersebut sedang mencari pekerjaan.
- j. Mempersiapkan usaha adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dalam rangka mempersiapkan suatu usaha/pekerjaan yang “baru”, yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan/keuntungan atas resiko sendiri, baik dengan atau tanpa mempekerjakan buruh/pekerja dibayar maupun tidak dibayar.
- k. Setengah penganggur adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu).
- l. Setengah penganggur terpaksa adalah setengah pengangguran yang masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan.
- m. Setengah penganggur sukarela adalah setengah pengangguran tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain (sebagian pihak menyebutnya sebagai pekerja paruh waktu/*part time worker*).
- n. Sekolah adalah kegiatan seseorang untuk bersekolah di sekolah formal, mulai dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi selama seminggu yang lalu sebelum pencacahan. Tidak termasuk yang sedang libur sekolah.
- o. Mengurus rumah tangga adalah kegiatan seseorang mengurus rumah tangga tanpa mendapatkan upah.
- p. Kegiatan lainnya adalah kegiatan seseorang selain di atas, yakni mereka yang sudah pensiun, orang-orang yang cacat jasmani (buta, bisu, dsb) yang tidak melakukan suatu pekerjaan seminggu yang lalu.
- q. Jumlah jam kerja seluruh pekerjaan adalah lamanya waktu dalam jam yang digunakan untuk bekerja dari seluruh pekerjaan, tidak termasuk

jam kerja istirahat resmi dan jam kerja yang digunakan untuk hal-hal di luar pekerjaan selama seminggu yang lalu.

- r. Lapangan usaha adalah bidang kegiatan dari pekerjaan/usaha/perusahaan/kantor tempat seseorang bekerja. Lapangan pekerjaan pada publikasi ini didasarkan pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2005).
- s. Jenis pekerjaan/jabatan adalah macam pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang atau ditugaskan kepada seseorang yang sedang bekerja atau sementara tidak bekerja. Jenis pekerjaan pada publikasi ini didasarkan pada Klasifikasi Baku Jenis Pekerjaan Indonesia (KBJI 2002) yang mengacu pada ISCO 88.
- t. Status pekerjaan adalah jenis kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit/kegiatan, yang dibedakan menjadi 7 kategori:
 - Berusaha sendiri adalah bekerja/berusaha dengan menanggung resiko secara ekonomis, yaitu dengan tidak kembalinya ongkos produksi yang telah dikeluarkan dalam rangka usahanya tersebut, serta tidak menggunakan pekerja dibayar, termasuk yang sifat pekerjaannya memerlukan teknologi atau keahlian khusus.
 - Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar adalah bekerja/berusaha resiko sendiri dan menggunakan buruh/pekerja tak dibayar dan atau buruh/pekerja tidak tetap.
 - Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar adalah berusaha atas resiko dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh/pekerja tetap yang dibayar.
 - Buruh/karyawan/pegawai adalah seseorang yang bekerja pada orang lain atau instansi/kantor/perusahaan secara tetap dengan menerima upah/gaji baik berupa uang maupun barang.
 - Pekerja bebas di pertanian adalah seseorang yang bekerja pada orang lain/majikan/instansi yang tidak tetap (lebih dari 1 majikan dalam sebulan terakhir) di usaha pertanian baik berupa usaha rumah tangga maupun bukan usaha rumah tangga atas

dasar balas jasa dengan menerima upah atau imbalan baik berupa uang maupun barang, dan baik dengan sistem pembayaran harian maupun borongan.

- Pekerja bebas di non pertanian adalah seseorang yang bekerja pada orang lain/majikan/instansi yang tidak tetap (lebih dari dari 1 majikan dalam sebulan terakhir) di usaha non pertanian dengan menerima upah atau imbalan baik berupa uang maupun barang, dan baik dengan sistem pembayaran harian maupun borongan.

<http://badungkab.bps.go.id>

BAB III

KONSEPSI TEORITIS

3.1. PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PEMERATAAN

Menurut Blakely, pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana Pemerintah Daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut (Kuncoro, 2004). Tolak ukur keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, dan semakin kecilnya kesenjangan pendapatan antarpenduduk, antar daerah dan antar sektor. Tujuan utama dari usaha-usaha pembangunan ekonomi selain menciptakan pertumbuhan yang setinggi-tingginya, harus pula menghapus atau mengurangi tingkat kemiskinan, kesenjangan pendapatan, dan tingkat pengangguran (Todaro, 2000). Oleh sebab itu, untuk mengatasi masalah-masalah tersebut merupakan prioritas utama dalam pembangunan daerah yang berasaskan pada terwujudnya pembangunan nasional.

Banyak orang yang beranggapan bahwa pertumbuhan ekonomi yang pesat selalu dibarengi kenaikan dalam ketimpangan distribusi pendapatan atau disebut dengan ketimpangan relatif. Dengan kata lain, para ekonom berpendapat bahwa antara pertumbuhan ekonomi yang pesat dan distribusi pendapatan terdapat suatu *trade off*, yang membawa implikasi bahwa pemerataan dalam pembagian pendapatan hanya dapat dicapai jika laju pertumbuhan ekonomi diturunkan. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi selalu akan disertai penurunan dalam distribusi pendapatan atau kenaikan dalam ketimpangan relatif.

Demikian pula dengan Rozy Munir (1986), melihat ada dua kelompok pendapat yang berbeda. Dua hal pertumbuhan dan pemerataan. Kelompok pertama menekankan pertumbuhan ekonomi dan kelompok kedua berupaya untuk melakukan pemerataan lebih awal daripada pertumbuhan. Lebih lanjut

dijelaskan bahwa percepatan pertumbuhan ekonomi dapat dicapai melalui perluasan industri dan penetapan harga yang dapat memacu peningkatan kemampuan daya beli masyarakat (*Purchasing Power Parity*). Sedangkan kelompok kedua memiliki pandangan bahwa strategi pembangunan yang memacu pada laju pertumbuhan ekonomi (GNP) saja, akan menuai kegagalan seperti pengangguran, pertumbuhan pendapatan yang sangat timpang, melebarnya jarak antara kaya dan miskin. Untuk mengatasi hal tersebut, kelompok ini menyarankan agar pembangunan ekonomi dibarengi dengan investasi yang mengarah pada sektor pendidikan, kesehatan, dan industri yang mengarah padat karya dan menyentuh pada kelompok miskin.

Menurut para kritikus, pembangunan ekonomi bukan hanya menyebabkan kenaikan dalam ketimpangan relatif, tetapi lebih parah lagi akan membawa pula kemerosotan taraf hidup absolut dari golongan miskin. Dengan kata lain, bukan saja ketimpangan relatif tetapi juga kemiskinan absolut akan bertambah akibat pertumbuhan ekonomi yang pesat. Hasil-hasil penelitian pertama mengenai hubungan jangka panjang antara pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan yang dilakukan oleh Prof. Simon Kuznets dari Universitas Harvard menunjukkan bahwa proses pembangunan ekonomi pada tahap awal pada umumnya disertai oleh kemerosotan yang cukup besar dalam pembagian pendapatan, yang baru berbalik menuju suatu pemerataan yang lebih besar dalam distribusi pendapatan pada tahap pembangunan lebih lanjut.

Untuk mempercepat pemerataan terjadi, Sigit Hananto (1980) mengemukakan pembangunan ekonomi yang mengacu pada pertumbuhan ekonomi hendaknya ditunjang dengan tingkat tabungan yang tinggi untuk memungkinkan adanya akumulasi modal.

Berkenaan dengan hal di atas, Both Anne dan Sundrun dalam Arndt (1983) melihat ada dua masalah yang agak jelas, yaitu : (1) Terdapat indikasi bahwa orang kaya di negara seperti Indonesia memang benar-benar membelanjakan kekayaan baru mereka, untuk dinikmati sendiri daripada menabung atau menginvestasikannya. (2) Di pihak lain, sejumlah penduduk

Indonesia mempunyai pendapatan yang rendah dan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti makan, pakaian, dan perumahan. Selanjutnya disimpulkan bahwa untuk menjamin seluruh sektor dalam masyarakat agar memperoleh manfaat pertumbuhan ekonomi dalam jangka waktu yang panjang diperlukan peningkatan investasi pada kegiatan yang secara langsung produktif, dan harus diikuti pula dengan kemajuan dalam prasarana pendidikan sehingga seluas mungkin masyarakat dapat mengambil bagian dalam proses pembangunan.

Lebih lanjut, Todaro (2000) mengatakan meskipun laju pertumbuhan ekonomi tidak secara otomatis dapat memberi jawaban atas berbagai macam persoalan kesejahteraan, namun hal tersebut tetap merupakan unsur penting setiap program pembangunan realistik yang sengaja dirancang untuk mengentaskan kemiskinan.

Jika dilihat dari hasil penelitian dan data-data statistik dalam dasawarsa yang lalu, akan terlihat bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi telah berjalan dengan pesat namun pertumbuhan yang pesat ini telah membawa akibat yang mengkhawatirkan, yaitu terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan yang lebih buruk. Meskipun pertumbuhan mampu mengurangi persentase penduduk miskin namun di lain pihak sebagian penduduk miskin menjadi semakin miskin. Dengan demikian, Indonesia belum termasuk kelompok negara-negara berkembang yang telah berhasil dalam menggabungkan pertumbuhan ekonomi yang pesat dengan distribusi pendapatan yang makin merata serta pengurangan kemiskinan absolut yang lebih pesat. Oleh karena itu, upaya-upaya untuk melaksanakan pemerataan hasil-hasil pembangunan harus terus dilakukan oleh pemerintah. Pemerataan berarti suatu pembagian hasil produksi kepada masyarakat yang lebih merata, sehingga dirasakan keadilannya

Kenyataan bahwa Indonesia belum mampu melaksanakan pemerataan pembangunan mengharuskan kita untuk juga memikirkan cara lain yang perlu ditempuh agar Indonesia dalam tahun-tahun mendatang lebih berhasil dalam menanggulangi masalah ketimpangan distribusi pendapatan

dan pemerataan pembangunan. Dalam hal ini, yang perlu diperhatikan juga adalah strategi pembangunan alternatif yang dapat diterapkan di Indonesia dengan menggabungkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan.

3.2. BEBERAPA ASPEK KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN

Procovitch pernah menyampaikan beberapa dugaannya tentang sebab-sebab terjadinya kepincangan pembagian pendapatan yakni pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan penduduk, perkembangan kota desa, dan sistem pemerintahan yang bersifat plutokratis. Beberapa aspek yang telah diduga oleh Procovits pada tahun 1955 dikembangkan oleh Kuznets, yang sampai dewasa ini masih dikenal dengan hipotesa Kuznets, yang menimbulkan kontroversi di kalangan peneliti distribusi pendapatan di berbagai negara. Hipotesa ini menyatakan bahwa hubungan tingkat pertumbuhan ekonomi dengan tingkat kepincangan pembagian pendapatan pada tahap ini menjadi negatif. Jadi, tahap pertama pembangunan ekonomi akan mengalami tingkat kepincangan pembagian pendapatan yang semakin memburuk, stabil dan akhirnya menurun. Pola perkembangan ini menurut Kuznets tidak terlepas dari kondisi sosial dan ekonomi suatu masyarakat. Penyebabnya adalah terjadinya konsentrasi kekayaan pada kelompok atas, kurang efektifnya pajak yang progresif, dan terjadinya akumulasi pemilikan modal.

Chiswick menyatakan bahwa dengan meningkatnya pembangunan ekonomi, kesenjangan pembagian penghasilan masyarakat juga meningkat, karena semakin cepat ekonomi berkembang, maka orang mengharapkan hasil yang semakin tinggi dari pendidikannya ; sementara, kesempatan pendidikan sangat terbatas. Tingkat partisipasi penduduk dalam lapangan pekerjaan berkaitan dengan jumlah penduduk muda yang sedang sekolah atau sedang bekerja. Pekerja-pekerja muda yang tingkat pendidikan dan keterampilannya relatif rendah akan memperoleh upah yang rendah pula, dan hal ini akan

membuat pembagian pendapatan semakin senjang. Sebaliknya, jika penduduk muda ini masih tetap menambah ilmu pengetahuan dan meningkatkan kemampuan dan keterampilannya, berakibat berkurangnya kelompok penduduk yang berpendapatan rendah sehingga akibat selanjutnya adalah tingkat kesenjangan distribusi pendapatan pun akan menurun.

Mengingat demikian luasnya ruang lingkup yang mencakup berbagai kemungkinan faktor penyebab ketidakmerataan pembagian pendapatan. Esmara Hendra (1976) mengemukakan bahwa faktor yang mempengaruhi ketimpangan pembagian pendapatan tidak seluruhnya dapat dinyatakan secara kuantitatif, tetapi faktor-faktor kualitatif yang terdapat di dalamnya juga sangat penting. Keseluruhan faktor tersebut biasanya dapat dikategorikan menjadi dua bagian besar, yaitu : (1) aspek ekonomi makro, yang mencakup struktur perekonomian suatu negara. Kerangka ini biasanya memperhatikan aspek-aspek pertanian dan non pertanian kota dan pedesaan, tingkat pembangunan daerah, kesempatan kerja, dan kekayaan. (2) Aspek ekonomi mikro yang mencoba menjelaskan ketimpangan pembagian pendapatan dengan memperhatikan kapasitas masing-masing individu. Berbagai faktor yang mempengaruhi kapasitas tersebut seperti umur, pendidikan, lamanya hari kerja, jabatan, dan sebagainya.

Sigit Hananto (1980) menambahkan bahwa perubahan pembagian pendapatan juga disebabkan karena adanya perbedaan status tenaga kerja, seperti ada pengusaha, buruh, pegawai, pekerja sendiri, dan ada pula pekerja keluarga. Perbedaan status tenaga kerja inilah yang mengakibatkan pergeseran pembagian pendapatan dalam suatu sektor ekonomi. Perbedaan antar sektor sebenarnya dapat diterima, karena mau tak mau pasti terjadi perbedaan pertumbuhan produk antar sektor, sebagai akibat dari pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya ditekankan agar perbedaan antar status tenaga kerja dalam suatu sektor dijaga jangan sampai semakin melebar.

3.3. UKURAN DISTRIBUSI PENDAPATAN

Para ekonom pada umumnya membedakan dua ukuran pokok distribusi pendapatan yang digunakan untuk berbagai kajian kuantitatif dan analisis kualitatif. Ukuran tersebut adalah : (1) Ukuran Distribusi, yakni besar atau kecilnya bagian pendapatan yang diterima masing-masing orang atau rumahtangga, dan (2) Distribusi Fungsional atau distribusi kepemilikan faktor produksi (Todaro, 2000).

a. KOEFISIEN GINI/ *GINI RATIO*

Salah satu indikator yang sering digunakan untuk mengetahui kesenjangan distribusi pendapatan adalah Gini Ratio. Nilai gini ratio berkisar antara nol dan satu. Bila gini ratio sama dengan nol berarti distribusi pendapatan amat merata sekali karena setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama. Namun bila gini ratio sama dengan satu menunjukkan bahwa terjadi ketimpangan distribusi pendapatan yang sempurna karena seluruh pendapatan hanya dinikmati oleh satu orang saja. Singkatnya, semakin tinggi nilai gini ratio maka semakin timpang distribusi pendapatan suatu daerah. Sebaliknya, semakin rendah nilai gini ratio berarti semakin merata distribusi pendapatannya. Pada prakteknya nilai Gini Ratio berkisar 0,50 – 0,70 dikategorikan ketimpangan tajam, sedangkan nilai Gini Ratio berkisar 0,20 – 0,35 ketimpangan relatif baik (merata).

Gini Ratio dapat digambarkan dengan suatu kurva yang disebut dengan Kurva Lorentz. Kurva ini memberi gambaran tentang bagaimana pendistribusian pendapatan penduduk suatu wilayah atau daerah pada suatu waktu. Kurva Lorentz didefinisikan sebagai kurva yang menunjukkan hubungan antara persentase kumulatif banyaknya rumah tangga/penduduk dengan persentase kumulatif pendapatan yang diterima oleh rumah tangga/penduduk daerah tersebut, apabila unit pendapatan ditata menurut urutan menaik.

Rumus untuk menghitung gini ratio adalah sebagai berikut:

$$G = 1 - \sum_{i=1}^k \frac{P_i(Q_i + Q_{i-1})}{10.000}$$

dimana :

G = Gini ratio

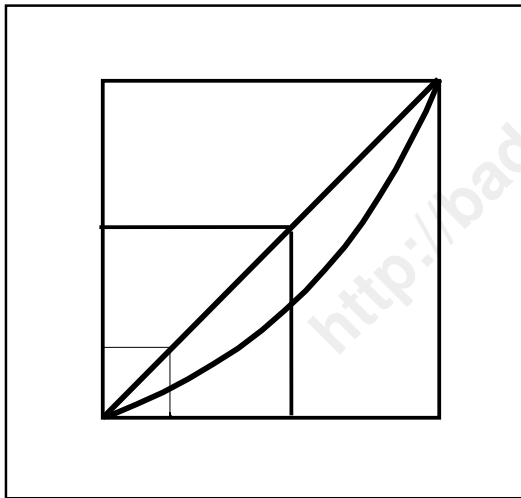
P_i = Persentase rumah tangga/penduduk pada kelompok pendapatan ke-i)

Q_i = Persentase kumulatif pendapatan sampai dengan kelompok ke-(i)

Q_{i-1} = Persentase kumulatif pendapatan sampai dengan kelompok ke-(i-1)

K = Banyaknya kelompok pendapatan.

Gambar 1.
Kurva Lorentz



OC = Persentase kumulatif pendapatan

OA = Persentase kumulatif penduduk

OB = Diagonal Gini

D = menunjukkan bahwa 20 persen penduduk menikmati sekitar 8 persen pendapatan.

Idealnya adalah 20 persen, demikian pula E identik dengan D. Makin jauh garis ODEB dari diagonal OB makin senjang tingkat pendapatan.

b. KRITERIA BANK DUNIA

Bank Dunia mengelompokkan penduduk menurut kelompok pendapatan menjadi tiga kelompok pendapatan yaitu: pertama; 40 persen penduduk berpendapatan rendah, kedua; 40 persen penduduk berpendapatan menengah, ketiga; 20 persen penduduk berpendapatan tinggi.

Untuk melihat pemerataan pendapatan, Bank Dunia memfokuskan perhatiannya pada perkembangan pendapatan 40 persen penduduk berpendapatan terendah saja. Pemerataan diukur berdasarkan persentase pendapatan yang diterima 40 persen penduduk berpendapatan rendah.

- a. Apabila 40 persen penduduk dalam kelompok berpendapatan terendah ini menerima kurang dari 12 persen jumlah pendapatan, maka dikatakan pemerataan rendah atau ketimpangan distribusi pendapatan tinggi.
- b. Apabila 40 persen penduduk dalam kelompok berpendapatan terendah ini menerima antara 12 persen sampai 17 persen jumlah pendapatan, maka dikatakan pemerataan sedang atau ketimpangan distribusi pendapatan sedang.
- c. Apabila 40 persen penduduk dalam kelompok berpendapatan terendah ini menerima lebih dari 17 persen jumlah pendapatan, maka dikatakan pemerataan tinggi atau ketimpangan distribusi pendapatan rendah.

3.4. KETENAGAKERJAAN

Di negara-negara berkembang seperti halnya Indonesia, masalah ketenagakerjaan dan pengangguran merupakan masalah yang lebih rumit dan lebih serius daripada masalah perubahan dalam distribusi pendapatan yang kurang menguntungkan penduduk yang berpendapatan rendah. Keadaan di negara-negara berkembang dalam beberapa dasawarsa ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi yang terjadi tidak sanggup menyediakan kesempatan kerja yang lebih cepat daripada pertumbuhan penduduk. Kesenjangan inilah yang mengakibatkan timbulnya berbagai masalah ketenagakerjaan dan pengangguran. Masalah ketenagakerjaan di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor semakin sedikitnya lapangan pekerjaan, tingginya tingkat pengangguran, rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya perlindungan hukum, upah yang kurang layak, faktor eksternal (contoh: krisis global), serta rendahnya kreativitas dan inovasi.

Masalah ketenagakerjaan di negara berkembang ternyata mempunyai dampak dan implikasi yang jauh lebih kompleks dibandingkan di negara-negara maju diantaranya kian beragamnya tindakan kriminal, makin banyaknya jumlah anak jalanan, pengemis, pengamen, perdagangan anak dan sebagainya. Hal ini mengakibatkan turunnya kualitas sumber daya manusia, tidak dihargainya martabat dan harga diri manusia yang merupakan korban sosial dari penyakit sosial. Karena itu diperlukan upaya yang komprehensif dengan berbagai pendekatan dalam mengatasi masalah ketenakerjaan ini.

Kondisi ketenagakerjaan di negara berkembang seperti Indonesia memiliki karakteristik yang unik diantaranya adanya pengangguran di kalangan orang-orang berpendidikan. Hal ini terjadi karena bagi mereka yang tidak berpendidikan rela melakukan pekerjaan apa pun demi mendapatkan sesuap nasi. Sebaliknya mereka yang berpendidikan hanya bersedia bekerja jika pekerjaan tersebut dapat menghasilkan uang, status atau kepuasan yang relatif tinggi. Hal inilah yang mengakibatkan semakin tinggi pendidikan semakin besar peluangnya untuk menganggur.

Di sisi lain ketidakmampuan para pengusaha (karena skala bisnisnya sangat terbatas) mendorong mereka menjadi pekerja mandiri (menciptakan lapangan kerjanya sendiri). Pekerja mandiri di negara-negara berkembang biasanya merupakan pedagang asongan, pemilik warung kecil, tukang semir sepatu, pengamen, penarik becak maupun perajin kaki lima yang semata-mata hanya berusaha mempertahankan kelangsungan hidupnya sehingga dalam melakukan pekerjaannya tidak optimal. Mereka inilah yang digolongkan sebagai setengah pengangguran. Berbeda dengan di negara-negara maju dimana pekerja mandiri umumnya merupakan pemilik perusahaan kecil, mitra dalam sebuah firma maupun tenaga profesional seperti pengacara, dokter, akuntan dan sebagainya.

Meningkatnya partisipasi wanita dalam dunia kerja juga menimbulkan masalah sendiri, karena kebanyakan dari mereka hanya bekerja di tempat yang tidak banyak menghasilkan pendapatan bahkan tidak dibayar sama sekali karena hanya terpusat di sektor pertanian maupun kegiatan informal

lainnya. Kaum wanita hampir selalu mengalami diskriminasi dalam hal perolehan imbalan, peningkatan kelas pekerjaan maupun keamanan kerja. Selain itu proporsi wanita yang menganggur juga lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki.

Tingginya tingkat pengangguran di usia muda terutama di kalangan wanita juga menimbulkan masalah tersendiri. Lebih dari 30 persen pengangguran merupakan pemuda. Hal ini umumnya terjadi di daerah-daerah perkotaan. Banyak diantaranya yang merupakan migran dari perdesaan yang mengharapkan mendapat pekerjaan yang layak di kota. Pesatnya laju pertumbuhan penduduk di negara berkembang menyebabkan proporsi pemuda terhadap total penduduk menjadi besar yang tentunya menambah tekanan terhadap penyediaan lapangan pekerjaan.

<http://badungkab.bps.go.id>

BAB IV

POLA KONSUMSI

4.1. PENGELUARAN PERKAPITA

Tingkat kesejahteraan penduduk salah satunya dapat dilihat dari tingkat pendapatannya. Semakin tinggi tingkat pendapatan maka penduduk dikatakan semakin sejahtera. Tetapi karena data pengeluaran lebih teliti dibandingkan data pendapatan dan dianggap cukup representatif menggambarkan tingkat pendapatan penduduk maka data pengeluaran digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk.

Pengeluaran/konsumsi rumah tangga sebulan adalah rata-rata biaya yang dikeluarkan rumah tangga sebulan untuk konsumsi rumah tangga. Pengeluaran rumah tangga dibedakan menjadi dua yaitu pengeluaran makanan dan non makanan. Pengeluaran untuk makanan meliputi pengeluaran untuk konsumsi padi-padian, umbi-umbian, ikan/udang/cumi/kerang, daging, telur dan susu, sayur-sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, bahan minuman, bumbu-bumbuan, konsumsi lainnya, makanan dan minuman jadi serta tembakau dan sirih. Pengeluaran non makanan meliputi pengeluaran untuk perumahan dan fasilitas rumah tangga, aneka barang dan jasa, pakaian, alas kaki dan tutup kepala, barang tahan lama, pajak, pungutan dan asuransi serta keperluan pesta dan upacara/kenduri.

Pengeluaran untuk makanan dihitung menggunakan pendekatan *consumption approach* artinya yang dihitung sebagai pengeluaran adalah yang sudah benar-benar dikonsumsi selama masa referensi (seminggu yang lalu). Sedangkan pengeluaran untuk non makanan dihitung menggunakan *delivery approach* artinya yang dihitung sebagai konsumsi/pengeluaran adalah barang-barang yang sudah dibeli (meskipun belum lunas)/diperoleh/digunakan oleh anggota rumah tangga selama masa referensi (sebulan yang lalu dan setahun yang lalu).

Seiring dengan meningkatnya harga barang kebutuhan masyarakat, rata-rata pengeluaran penduduk Kabupaten Badung juga terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2006, secara rata-rata masing-masing penduduk di Kabupaten Badung membutuhkan Rp. 426.897,- per bulan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik berupa makanan maupun non makanan. Jumlah ini meningkat pada tahun 2007 menjadi sebesar Rp. 444.374,- perkapita perbulan. Dan pada tahun 2008 rata-rata pengeluaran perkapita penduduk Badung sudah mencapai Rp. 654.851,- perbulan dan terus meningkat hingga pada tahun 2009 mencapai Rp. 706.732,- perkapita perbulan.

Tabel 1. Rata-rata Pengeluaran Perkapita Penduduk Kabupaten Badung Menurut Klasifikasi Daerah, Tahun 2006 – 2009

Tahun	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
2006	479.473	332.432	426.897
2007	470.801	396.667	444.374
2008	721.260	480.359	654.851
2009	758.722	570.123	706.732

Sumber: Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional

4.2. POLA KONSUMSI

Perilaku konsumsi masyarakat dapat dilihat dari pola pengeluaran rumahtangga. Pengelompokan pengeluaran menjadi pengeluaran makanan dan pengeluaran non makanan digunakan untuk melihat kecenderungan konsumsi rumah tangga dari waktu ke waktu. Kecenderungan tersebut biasanya dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, selera dan lingkungan. Dalam kondisi pendapatan terbatas, kita akan mendahulukan pemenuhan kebutuhan makanan, sehingga pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah akan terlihat bahwa sebagian besar pendapatannya digunakan untuk membeli makanan. Seiring dengan peningkatan pendapatan maka lambat laun akan terjadi pergeseran pola pengeluaran, yaitu penurunan porsi pendapatan yang dibelanjakan untuk makanan dan peningkatan porsi pendapatan yang dibelanjakan untuk bukan makanan. Ernest Engel mengemukakan bahwa semakin tinggi pengeluaran rumahtangga dapat mengindikasikan semakin sejahtera masyarakatnya. Demikian juga halnya,

semakin sejahtera suatu masyarakat cenderung memiliki pengeluaran non makanan lebih besar dari konsumsi makanan

Pergeseran konsumsi atau pola pengeluaran tersebut terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan pada umumnya rendah, sementara elastisitas permintaan terhadap barang bukan makanan pada umumnya tinggi. Keadaan ini semakin jelas terlihat pada kelompok penduduk yang tingkat konsumsi makanannya sudah mencapai titik jenuh, sehingga peningkatan pendapatan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan barang bukan makanan (kalau bukan disimpan/ditabung atau diinvestasikan kembali).

Tabel 2. Pola Konsumsi Penduduk Kabupaten Badung Menurut Jenis Pengeluaran, Tahun 2006 – 2009

Jenis Pengeluaran	2006		2007		2008		2009	
	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
Pengeluaran makanan perkapita	188.376	44,13	208.660	46,96	284.559	43,45	336.052	47,55
Pengeluaran non makanan perkapita	238.521	55,87	235.714	53,04	370.292	56,55	370.679	52,45
Pengeluaran perkapita	426.897	100,00	444.374	100,00	654.851	100,00	706.732	100,00

Sumber: Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional

Data Susenas menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, pola konsumsi penduduk Badung relatif tidak mengalami perubahan. Mereka mengalokasikan lebih dari separuh pengeluarannya untuk konsumsi non makanan. Pada tahun 2009 ini, hanya sebesar 47,55 persen pengeluaran digunakan untuk konsumsi makanan dan sebagian besar lainnya yaitu sebesar 52,45 persen untuk konsumsi non makanan.

Tabel berikut menunjukkan bahwa proporsi pengeluaran penduduk untuk konsumsi makanan pada awalnya akan meningkat seiring dengan peningkatan pendapatan, tetapi kemudian akan menurun setelah mencapai titik tertentu yaitu kondisi dimana konsumsi makanan sudah mencapai titik jenuh. Pada kondisi tersebut penduduk akan mengalihkan pengeluarannya

untuk konsumsi non makanan sehingga proporsi pengeluaran untuk konsumsi non makanan cenderung meningkat.

Tabel 3. Proporsi Pengeluaran Penduduk Kabupaten Badung Menurut Kelompok, Jenis Pengeluaran dan Klasifikasi Daerah, 2009

Kelompok Pengeluaran/	Pengeluaran	Pengeluaran non	Pengeluaran
200 000 - 299 999	48,96	51,04	100,00
300 000 - 499 999	54,96	45,04	100,00
> 500 000	46,15	53,85	100,00
Perkotaan	47,03	52,97	100,00
200 000 - 299 999	56,61	43,39	100,00
300 000 - 499 999	53,76	46,24	100,00
> 500 000	47,06	52,94	100,00
Perdesaan	49,36	50,64	100,00
200 000 - 299 999	53,07	46,93	100,00
300 000 - 499 999	54,38	45,62	100,00
> 500 000	46,31	53,69	100,00
Perkotaan + Perdesaan	47,55	52,45	100,00

Sumber: Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional

Pola konsumsi penduduk juga menunjukkan perbedaan antara daerah perkotaan dan perdesaan. Dari tahun ke tahun pengeluaran penduduk yang tinggal di daerah perdesaan lebih kecil dibandingkan dengan penduduk yang tinggal di daerah perkotaan. Hal ini terjadi untuk semua jenis pengeluaran baik untuk konsumsi makanan maupun non makanan.

**Tabel 4. Pola Konsumsi Penduduk Kabupaten Badung
Menurut Jenis Pengeluaran dan Klasifikasi Daerah, Tahun 2006 – 2009**

Tahun/Klasifikasi Daerah		Jenis Pengeluaran		
		Pengeluaran makanan perkapita	Pengeluaran non makanan perkapita	Pengeluaran perkapita
2006	K	209.701	269.772	479.473
	D	150.062	182.370	332.432
	K+D	188.376	238.521	426.897
2007	K	220.152	250.649	470.801
	D	187.914	208.753	396.667
	K+D	208.660	235.714	444.374
2008	K	310.768	410.492	721.260
	D	215.694	264.666	480.359
	K+D	284.559	370.292	654.851
2009	K	356.856	401.867	758.722
	D	281.390	288.733	570.123
	K+D	336.052	370.679	706.732

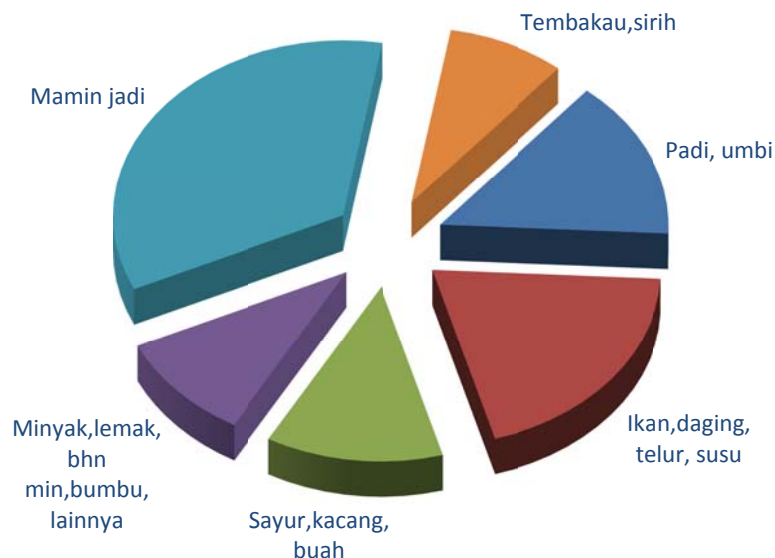
Sumber: Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional

Secara umum pola konsumsi penduduk yang tinggal di daerah perkotaan dan perdesaan menunjukkan pola yang serupa dimana bagian terbesar pengeluaran digunakan untuk konsumsi non makanan. Namun demikian kesenjangan antara pengeluaran makanan dan non makanan lebih tinggi di daerah perkotaan. Sedangkan di daerah perdesaan relatif seimbang meski masih lebih besar konsumsi non makanan.

a. KONSUMSI MAKANAN

Makanan merupakan kebutuhan pokok manusia untuk tetap hidup, sehingga sebesar apapun pendapatan seseorang ia akan tetap berusaha untuk mendapatkan makanan yang memadai. Seseorang atau rumah tangga akan terus menambah konsumsi makanannya sejalan dengan bertambahnya pendapatan, namun sampai pada batas tertentu penambahan pendapatan tidak lagi menyebabkan bertambahnya jumlah makanan yang dikonsumsi, karena kebutuhan manusia akan makanan pada dasarnya mempunyai titik jenuh. Bila secara kuantitas kebutuhan seseorang sudah terpenuhi maka lazimnya ia akan mementingkan kualitas atau beralih pada pemenuhan bukan makanan. Dengan demikian ada kecenderungan semakin tinggi pendapatan semakin berkurang persentase pendapatan yang dibelanjakan untuk makanan. Oleh karena itu komposisi pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan ukuran guna menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk, dengan asumsi bahwa penurunan persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran merupakan gambaran membaiknya tingkat perekonomian penduduk.

Gambar 3. Proporsi Pengeluaran Untuk Konsumsi Makanan Penduduk Kab.Badung, Tahun 2009



Seperti tahun sebelumnya, pengeluaran konsumsi makanan penduduk Kabupaten Badung yang rata-rata mencapai Rp. 336.052,- perkapita perbulan didominasi oleh pengeluaran untuk konsumsi makanan dan minuman jadi yang mencapai 34,59 persen. Tingkat kesadaran masyarakat akan gizi pada tahun 2009 ini juga mengalami peningkatan yang salah satunya ditandai dengan meningkatnya proporsi pengeluaran untuk konsumsi ikan, daging, telur dan susu yang mencapai 19,84 persen. Sementara proporsi pengeluaran untuk konsumsi beras dan umbi hanya sebesar 14,69 persen, menurun dibanding tahun sebelumnya. Namun sayangnya proporsi pengeluaran untuk konsumsi tembakau dan sirih termasuk di dalamnya rokok justru mengalami sedikit peningkatan yaitu mencapai 8,39 persen.

Tabel 5. Persentase Pengeluaran Perkapita Sub Kelompok Makanan Menurut Klasifikasi Daerah di Kabupaten Badung, 2009

Jenis Komoditi	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
Padi-padian	12,97	18,31	14,20
Umbi-umbian	0,43	0,69	0,49
Ikan	6,12	5,26	5,92
Daging	6,81	6,29	6,69
Telur dan susu	7,52	6,24	7,22
Sayur-sayuran	6,21	6,57	6,29
Kacang-kacangan	2,61	3,55	2,83
Buah-buahan	3,60	2,70	3,39
Minyak dan lemak	2,82	3,53	2,98
Bahan minuman	2,65	3,65	2,88
Bumbu-bumbuan	1,47	2,06	1,60
Konsumsi lainnya	2,46	2,69	2,52
Makanan dan minuman jadi	36,14	29,40	34,59
Tembakau dan sirih	8,19	9,04	8,39

Sumber: Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional

Secara umum tidak ada perbedaan yang cukup signifikan antara pola konsumsi makanan baik di daerah perkotaan maupun perdesaan. Konsumsi makanan di penduduk Kabupaten Badung tetap didominasi oleh pengeluaran untuk konsumsi makanan dan minuman jadi. Meskipun demikian penduduk yang tinggal di daerah perkotaan lebih mendahulukan konsumsi sumber-sumber protein seperti ikan, daging, telur dan susu. Sementara penduduk

yang tinggal di daerah perdesaan lebih mementingkan konsumsi padi-padian dan umbi-umbian.

Tabel 6. Persentase Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Untuk Sub Kelompok Makanan Menurut Jenis Komoditi dan Golongan Pengeluaran Perkapita Sebulan di Kabupaten Badung, 2009

Jenis Komoditi	Kelompok pengeluaran perkapita			Total
	200 000 - 299 999	300 000 - 499 999	> 500 000	
Padi-padian	32,42	22,14	12,42	14,20
Umbi-umbian	1,19	0,61	0,46	0,49
Ikan	12,56	6,10	5,83	5,92
Daging	3,24	5,26	7,01	6,69
Telur dan susu	4,22	6,13	7,47	7,22
Sayur-sayuran	6,91	8,07	5,92	6,29
Kacang-kacangan	5,86	4,46	2,47	2,83
Buah-buahan	0,95	2,58	3,57	3,39
Minyak dan lemak	4,66	4,11	2,73	2,98
Bahan minuman	5,35	3,81	2,67	2,88
Bumbu-bumbuan	1,98	2,12	1,49	1,60
Konsumsi lainnya	5,92	3,41	2,30	2,52
Makanan dan minuman jadi	9,14	24,26	36,91	34,59
Tembakau dan sirih	5,60	6,91	8,71	8,39
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00

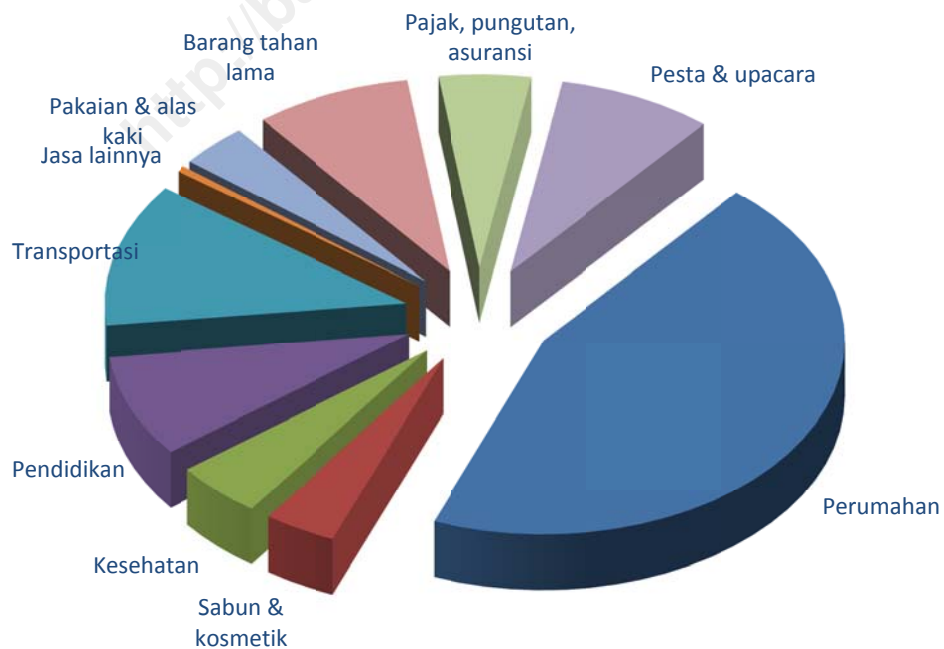
Sumber: Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional

Perbedaan pola konsumsi juga dapat dilihat menurut golongan pengeluaran perkapita penduduk. Tabel di atas menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendapatan penduduk yang ditandai dengan semakin besar total pengeluarannya, maka proporsi pengeluaran yang digunakan untuk konsumsi padi-padian dan umbi-umbian juga akan semakin kecil. Sebaliknya proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan jadi akan meningkat secara signifikan. Demikian pula halnya untuk konsumsi makanan sumber protein seperti ikan, daging, telur dan susu yang mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya total pengeluaran. Konsumsi tembakau dan rokok juga mengalami peningkatan yang signifikan sejalan dengan peningkatan total pengeluaran.

b. KONSUMSI NON MAKANAN

Pengeluaran untuk non makanan terdiri dari pengeluaran untuk perumahan dan fasilitas rumah tangga, aneka barang dan jasa, pakaian, barang tahan lama, pajak, pungutan dan asuransi. Rata-rata pengeluaran non makanan penduduk Kabupaten Badung pada tahun 2009 sebesar Rp.370.679,-. Pengeluaran ini sebagian besar dialokasikan untuk keperluan perumahan dan fasilitas rumah tangga yaitu mencapai 44,82 persen. Kemudian disusul oleh pengeluaran untuk kebutuhan transportasi yang mencapai 12,04 persen. Sementara itu pengeluaran untuk kebutuhan pendidikan, konsumsi barang tahan lama serta keperluan pesta dan upacara berada di kisaran 8 persen. Alokasi pengeluaran yang digunakan untuk kebutuhan kesehatan masih relatif rendah yaitu hanya sebesar 4,70 persen, sedikit lebih rendah dibandingkan pengeluaran untuk pajak, pungutan dan asuransi yang mencapai 4,97 persen.

Gambar 4. Proporsi Pengeluaran Perkapita Penduduk Kabupaten Badung Untuk Sub Kelompok Non Makanan, 2009



Secara umum ada kemiripan distribusi pengeluaran non makanan antara penduduk yang tinggal di daerah perkotaan dengan penduduk yang tinggal di daerah perdesaan. Meskipun demikian kontribusi pengeluaran untuk masing-masing jenis komoditi menunjukkan sedikit perbedaan diantara kedua jenis daerah tersebut. Kontribusi pengeluaran untuk kebutuhan perumahan di daerah perkotaan sebesar 46 persen dan di daerah perdesaan sebesar 40,50 persen. Sementara itu kontribusi pengeluaran untuk kebutuhan transportasi di daerah perkotaan sebesar 11,51 persen dan di daerah perdesaan sebesar 14 persen. Demikian dengan pengeluaran untuk keperluan pesta dan upacara keagamaan. Kontribusi pengeluaran untuk upacara di daerah perkotaan sebesar 7,49 persen dan di daerah perdesaan sebesar 11,59 persen.

Tabel 7. Proporsi Pengeluaran Perkapita Sub Kelompok Non Makanan Menurut Klasifikasi Daerah di Kabupaten Badung, 2009

Jenis Komoditi	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
Perumahan	46,00	40,50	44,82
Sabun & kosmetik	4,01	3,57	3,92
Kesehatan	3,89	7,65	4,70
Pendidikan	8,78	8,01	8,61
Transportasi	11,51	14,00	12,04
Jasa lainnya	0,62	0,08	0,50
Pakaian & alas kaki	3,79	3,18	3,66
Barang tahan lama	8,89	6,61	8,40
Pajak, pungutan, asuransi	5,02	4,81	4,97
Pesta & upacara	7,49	11,59	8,37

Sumber: Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional

Perbedaan pola konsumsi juga dapat dilihat menurut golongan pengeluaran perkapita penduduk. Secara umum distribusi pengeluaran untuk keperluan perumahan dan fasilitas rumah tangga menunjukkan kecenderungan menurun seiring dengan meningkatnya pendapatan. Sebaliknya distribusi pengeluaran untuk konsumsi barang tahan lama justru menunjukkan kecenderungan meningkat seiring dengan peningkatan pendapatan. Demikian pula halnya dengan biaya transportasi, pajak, pungutan dan asuransi. Namun sayangnya pengeluaran untuk keperluan

kesehatan dan pendidikan tidak menunjukkan perubahan yang signifikan meskipun terjadi kenaikan pendapatan. Sementara itu alokasi pengeluaran untuk keperluan pakaian dan alas kaki justru menurun jika pendapatan meningkat.

Tabel 8. Persentase Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Untuk Sub Kelompok Non Makanan Menurut Jenis Komoditi dan Golongan Pengeluaran Perkapita Sebulan di Kabupaten Badung, 2009

Jenis Komoditi	Kelompok pengeluaran perkapita			Total
	200 000 - 299 999	300 000 - 499 999	> 500 000	
Perumahan	49,60	47,00	44,46	44,82
Sabun & kosmetik	5,29	4,46	3,83	3,92
Kesehatan	4,97	5,88	4,52	4,70
Pendidikan	8,34	7,19	8,83	8,61
Transportasi	8,64	14,16	11,74	12,04
Jasa lainnya	0,00	0,05	0,57	0,50
Pakaian & alas kaki	5,69	4,19	3,57	3,66
Barang tahan lama	0,86	1,47	9,48	8,40
Pajak, pungutan, asuransi	1,98	3,87	5,15	4,97
Pesta & upacara	14,62	11,74	7,83	8,37
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional

BAB V

DISTRIBUSI PENDAPATAN

Perbedaan pola pembangunan antar wilayah ternyata tidak hanya menimbulkan perbedaan pola konsumsi penduduk, tetapi lebih jauh juga menimbulkan masalah bagaimana pendapatan daerah terbagi secara merata di antara penduduknya. Kesenjangan pendapatan penduduk pada akhirnya akan memunculkan berbagai permasalahan sosial di antaranya kemiskinan dan tindak kejahatan. Karena itu pemerintah menempatkan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengentasan kemiskinan sebagai salah satu prioritas utama pembangunan jangka menengah 2005–2009. Pengentasan kemiskinan tidak cukup hanya dengan membangun sarana dan prasarana fisik saja, tetapi juga perlu dijamin bahwa pembangunan yang dilaksanakan itu dapat menjangkau kepentingan orang banyak. Pembangunan yang dilaksanakan hendaknya tidak hanya mengejar tingkat pertumbuhan yang tinggi semata, tetapi juga harus memperhatikan azas pemerataan tanpa mengganggu stabilitas nasional.

Salah satu indikator yang sering digunakan untuk mengetahui kesenjangan distribusi pendapatan adalah *Gini Ratio*. Semakin tinggi nilai *gini ratio* maka semakin timpang distribusi pendapatan suatu daerah. Sebaliknya, semakin rendah nilai *gini ratio* berarti semakin merata distribusi pendapatannya.

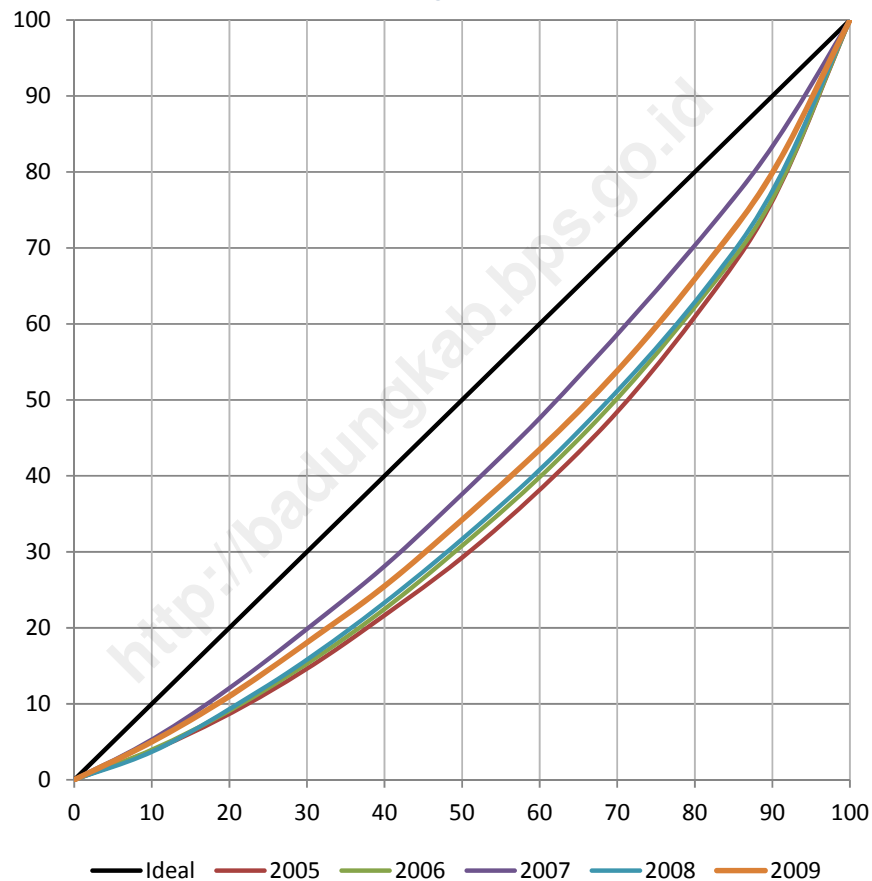
Tabel 9. Perkembangan Nilai *Gini Ratio* Kabupaten Badung Tahun 2005 – 2009

Tahun	Nilai Gini Ratio
2005	0,2966
2006	0,2794
2007	0,1740
2008	0,2673
2009	0,2273

Sumber: Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional

Hasil Susenas menunjukkan bahwa secara umum kesenjangan pendapatan di Kabupaten Badung tergolong rendah. Dalam setahun terakhir pemerataan pendapatan penduduk di Kabupaten Badung mengalami perbaikan yang ditandai dengan menurunkan nilai *gini ratio* dari 0,2673 pada tahun 2008 menjadi 0,2273 pada tahun 2009 ini.

**Gambar 5. Perkembangan *Gini Ratio*
Kab. Badung 2005 - 2009**



Selain *Gini Ratio*, ukuran ketimpangan lainnya yang sering digunakan adalah kriteria Bank Dunia. Untuk melihat pemerataan pendapatan, Bank Dunia memfokuskan perhatiannya pada perkembangan pendapatan 40 persen penduduk berpendapatan terendah saja. Pemerataan diukur berdasarkan persentase pendapatan yang diterima 40 persen penduduk berpendapatan rendah.

Tabel 10. Distribusi Pendapatan Kabupaten Badung Berdasarkan Kriteria Bank Dunia, Tahun 2005 – 2009

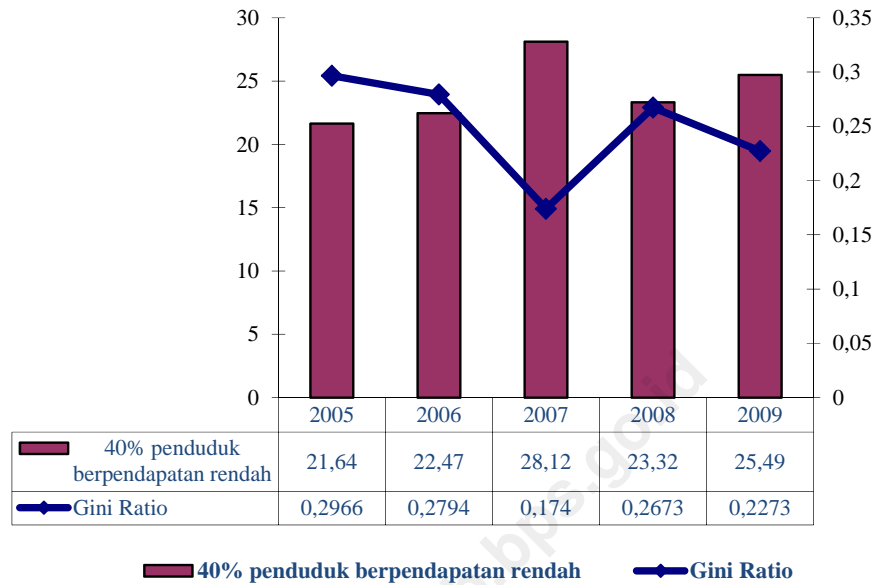
Kriteria Penduduk	2005	2006	2007	2008	2009
40% penduduk berpendapatan terendah	21,64	22,47	28,12	23,32	25,49
40% penduduk berpendapatan menengah	39,30	39,80	42,21	39,58	40,43
20% penduduk berpendapatan tertinggi	39,06	37,74	29,67	37,10	34,08

Sumber: Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional

Berdasarkan teori, ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten Badung pada tahun 2009 tergolong rendah, karena 40 persen penduduk berpenghasilan terendah menerima lebih dari 17 persen total pendapatan penduduk. Berdasarkan kriteria ini, bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten Badung mengalami penurunan yang ditandai dengan meningkatnya proporsi pendapatan yang diterima oleh 40 persen penduduk berpenghasilan terendah dari 23,32 persen pada tahun 2008 menjadi 25,49 persen pada tahun 2009. Demikian pula halnya dengan proporsi pendapatan yang diterima oleh 20 persen penduduk berpenghasilan tertinggi yang menurun dari 37,10 persen pada tahun 2008 menjadi 34,08 persen pada tahun 2009.

Fenomena yang ditunjukkan *Gini Ratio* menunjukkan kecenderungan yang sama dengan kriteria yang digunakan oleh Bank Dunia. Pada gambar berikut diperlihatkan kaitan antara *Gini Ratio* dengan persentase pendapatan yang diterima oleh 40 persen penduduk berpendapatan rendah. Semakin tinggi persentase pendapatan yang diterima oleh 40 persen penduduk berpendapatan rendah maka nilai *Gini Ratio* akan menurun. Hal ini mengindikasikan ketimpangan pendapatan menurun atau dengan kata lain pemerataan pendapatan meningkat. Sebaliknya jika persentase pendapatan yang diterima oleh 40 persen penduduk berpendapatan rendah menurun maka nilai *Gini Ratio* akan meningkat yang berarti mengindikasikan adanya peningkatan ketimpangan atau penurunan pemerataan pendapatan.

Gambar 6.
Gini Ratio dan Distribusi Pendapatan
Kabupaten Badung, 2005-2009



Ketimpangan distribusi pendapatan di daerah perdesaan relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan di daerah perkotaan. Hal ini dapat dilihat dari nilai *gini ratio* perdesaan yang lebih rendah jika dibandingkan dengan daerah perkotaan. Jika dilihat dari kriteria yang digunakan oleh Bank Dunia juga menunjukkan hal serupa. Proporsi pendapatan yang diterima oleh 40 persen penduduk berpenghasilan terendah di daerah perkotaan sebesar 26,16 persen, sedikit lebih kecil jika dibandingkan dengan daerah perdesaan sebesar 26,69 persen.

Tabel 11. Ketimpangan Pendapatan Antara Daerah Perkotaan dan Perdesaan Di Kabupaten Badung, Tahun 2008-2009

Daerah	<i>Gini Ratio</i>		40% penduduk berpendapatan rendah		40% penduduk berpendapatan menengah		20% penduduk berpendapatan tinggi	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
Perkotaan	0,2510	0,2198	24,15	26,16	39,79	40,11	36,06	33,72
Perdesaan	0,2500	0,2078	24,56	26,69	40,35	40,60	35,09	32,71
Perkotaan + Perdesaan	0,2673	0,2273	23,32	25,49	39,58	40,43	37,10	34,08

Sumber: Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional

BAB VI KETENAGAKERJAAN

6.1. GAMBARAN UMUM KETENAGAKERJAAN

Jumlah penduduk yang padat menuntut pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja yang semakin banyak, karena seseorang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan bekerja. Pekerjaan yang layak tentu saja mempengaruhi keadaan ekonominya. BPS membagi penduduk usia 15 tahun ke atas menurut kegiatan utamanya menjadi dua, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja terdiri atas penduduk yang bekerja dan menganggur, sedangkan bukan angkatan kerja terdiri atas penduduk yang sekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya.

Tabel 12. Kondisi Ketenagakerjaan Kabupaten Badung, 2007 – 2009

Indikator	2007	2008	2009
Penduduk Usia Kerja	304.381	310.215	317.058
Angkatan Kerja	233.807	234.599	239.289
Bekerja	223.108	227.091	231.628
Bekerja Penuh (\geq 35 jam seminggu)	178.037	173.772	186.653
Setengah Menganggur ($<$ 35 jam seminggu)	45.071	53.319	44.975
Menganggur	10.699	7.508	7.661
Bukan Angkatan Kerja	70.574	75.616	77.769
Sekolah	22.603	21.802	26.909
Mengurus Rumah Tangga	42.098	44.596	44.696
Lainnya	5.873	9.218	6.164
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	76,81	75,62	73,06
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,58	3,20	3,20
Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	95,42	96,80	96,80

Sumber: Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional

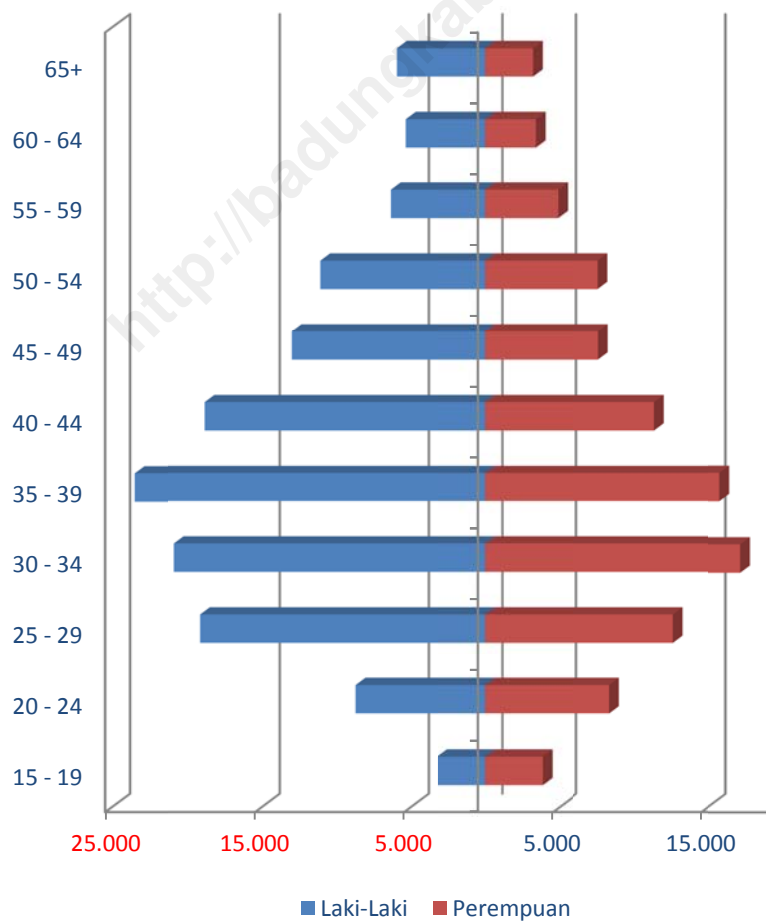
Pada tahun 2009, dari sebanyak 317.058 penduduk usia 15 tahun ke atas, sebanyak 239.289 orang merupakan angkatan kerja sedangkan sisanya 77.769 orang adalah bukan angkatan kerja. TPAK pada tahun 2009 sebesar 73,06 persen, mengalami sedikit penurunan jika dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya. Namun di sisi lain tingkat pengangguran terbuka juga menurun dibandingkan dengan tahun 2007 yang sebesar 4,58 persen

sedangkan pada tahun 2009 menjadi 3,20 persen. Dengan demikian yang terserap di pasar kerja hanya sebesar 96,80 persen.

6.2. PROFIL PENDUDUK YANG BEKERJA

Partisipasi perempuan dalam dunia kerja belum sebesar laki-laki. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pekerja perempuan yang lebih kecil dari pekerja laki-laki. Hampir di setiap kelompok umur jumlah perempuan yang bekerja lebih kecil dibandingkan jumlah laki-laki, kecuali untuk kelompok umur 15 – 19 tahun. Penduduk yang bekerja terkonsentrasi pada kelompok umur produktif yaitu kelompok umur 25 – 54 tahun dengan proporsi terbesar pada kelompok umur 35 – 39 tahun.

Gambar 7. Penduduk Yang Bekerja Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur, 2009



Perekonomian Kabupaten Badung bertumpu pada kegiatan pariwisata. Karena itu tidak mengherankan jika sektor perdagangan, hotel dan restoran merupakan sektor yang menyerap tenaga kerja paling banyak yaitu mencapai 67.958 orang (29,34 persen). Kemudian disusul oleh sektor pertanian sebanyak 49.706 orang (21,46 persen), sektor jasa sebanyak 35.547 orang (15,35 persen) dan sektor industri sebanyak 31.596 orang (13,64 persen).

Tabel 13. Jumlah Penduduk Kabupaten Badung Usia 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Utama, 2007-2009

Lapangan Usaha Utama	2007		2008		2009	
	N	%	N	%	N	%
Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan	47.068	21,10	52.772	23,24	49.706	21,46
Pertambangan dan Penggalian	310	0,14	172	0,08	198	0,09
Industri	24.431	10,95	20.617	9,08	31.596	13,64
Listrik, Gas dan Air Minum	786	0,35	1.372	0,60	1.076	0,46
Konstruksi	21.310	9,55	22.467	9,89	20.256	8,75
Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi	76.349	34,22	71.627	31,54	67.958	29,34
Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	11.215	5,03	12.933	5,70	16.269	7,02
Lembaga Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan & Jasa Perusahaan	9.838	4,41	9.124	4,02	9.022	3,90
Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan	31.801	14,25	36.007	15,86	35.547	15,35
JUMLAH	223.108	100,00	227.091	100,00	231.628	100,00

Sumber: Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional

Tingkat pendidikan penduduk yang bekerja menunjukkan kualitas pekerja di suatu wilayah. Secara umum tenaga kerja di Kabupaten Badung merupakan tenaga kerja terdidik. Pada tabel berikut dapat dilihat bahwa lebih dari 51,26 persen penduduk yang bekerja memiliki ijazah SMA maupun perguruan tinggi dan hanya sekitar 17,54 persen yang tidak memiliki ijazah sama sekali. Jenjang pendidikan pekerja tentunya akan mempengaruhi

upah/gaji yang diterimanya dan secara langsung berdampak pada tingkat kesejahteraan penduduk.

Tabel 14. Jumlah Penduduk Kabupaten Badung Usia 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan, 2007-2009

Tingkat Pendidikan	2007		2008		2009	
	N	%	N	%	N	%
Tidak/blm sekolah	13.908	6,23	13.811	6,08	16.541	7,14
Tidak/blm tamat SD	14.668	6,57	13.331	5,87	24.094	10,40
SD dan sederajat	54.782	24,55	52.166	22,97	35.973	15,53
SLTP dan sederajat	33.804	15,15	32.139	14,15	36.290	15,67
SLTA dan sederajat	79.890	35,81	88.590	39,01	88.540	38,23
Perguruan tinggi	26.056	11,68	27.054	11,91	30.190	13,03
Jumlah	223.108	100,00	227.091	100,00	231.628	100,00

Sumber: Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional

Berdasarkan jumlah jam kerjanya dapat digambarkan karakteristik pekerja di suatu wilayah. Penduduk yang jam kerjanya lebih dari 35 jam dalam seminggu dikategorikan sebagai pekerja penuh. Sedangkan penduduk yang jumlah jam kerjanya 1 sampai 34 jam seminggu dikategorikan sebagai setengah pengangguran atau pekerja paruh waktu (*part time worker*). Penduduk yang bekerja tetapi jumlah jam kerjanya seminggu yang lalu hanya 0 jam dikategorikan sebagai sementara sedang tidak bekerja.

Hasil Sakernas menunjukkan bahwa 80,58 persen pekerja merupakan pekerja penuh. Hanya 18,24 persen pekerja saja yang merupakan setengah pengangguran. Sedangkan sisanya 1,18 persen adalah orang-orang yang seminggu yang lalu sedang sementara tidak bekerja karena sakit, cuti, mogok kerja dan lain sebagainya.

Tabel 15. Jumlah Penduduk Kabupaten Badung Usia 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja, 2007-2009

Jumlah Jam Kerja	2007		2008		2009	
	N	%	N	%	N	%
0	4.127	1,85	3.901	1,72	2.725	1,18
1 - 34	45.071	20,20	53.319	23,48	42.250	18,24
35+	173.910	77,95	169.871	74,80	186.653	80,58
Jumlah	223.108	100,00	227.091	100,00	231.628	100,00

Sumber: Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional

Sebagian besar pekerja di Kabupaten Badung berstatus sebagai buruh/karyawan/pegawai yaitu sebanyak 37,06 persen, menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 40,85 persen. Di sisi lain persentase pekerja yang berstatus berusaha baik berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak dibayar maupun berusaha dibantu buruh dibayar justru mengalami peningkatan yaitu dari 37,83 persen pada tahun 2008 menjadi 42,04 persen pada tahun 2009.

Tabel 16. Jumlah Penduduk Kabupaten Badung Usia 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Status Dalam Pekerjaan Utama, 2007-2009

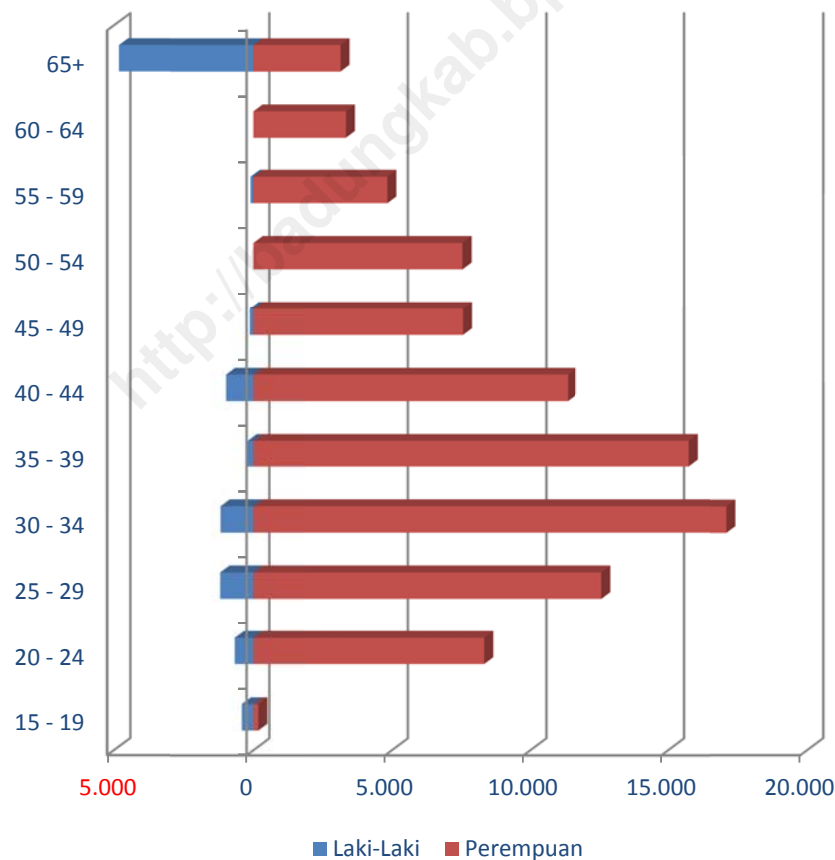
Status/Kedudukan Dalam Pekerjaan Utama	2007		2008		2009	
	N	%	N	%	N	%
Berusaha sendiri	42.151	18,89	34.334	15,12	46.204	19,95
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar	32.394	14,52	44.524	19,61	40.441	17,46
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	10.021	4,49	7.044	3,10	10.735	4,63
Buruh/karyawan/pegawai	99.087	44,41	92.760	40,85	85.847	37,06
Pekerja bebas di pertanian	1.497	0,67	3.620	1,59	4.230	1,83
Pekerja bebas di non pertanian	14.698	6,59	19.418	8,55	17.398	7,51
Pekerja keluarga/tak dibayar	23.260	10,43	25.391	11,18	26.773	11,56
Jumlah	223.108	100,00	227.091	100,00	231.628	100,00

Sumber: Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional

6.3. PROFIL PENGANGGURAN TERBUKA

Rendahnya partisipasi perempuan dalam dunia kerja juga dalam dilihat dari tingginya tingkat pengangguran terbuka perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini terjadi di setiap kelompok umur. Fenomena yang menarik, pengangguran terbuka khususnya perempuan justru terkonsentrasi di kelompok umur produktif yaitu kelompok umur 25 – 44 tahun. Sedangkan untuk laki-laki pengangguran terbuka terkonsentrasi di kelompok umur tua yaitu kelompok umur 65 tahun ke atas. Hal ini menunjukkan bahwa di usia produktif, laki-laki mempunyai akses ke pasar kerja yang lebih besar bila dibandingkan perempuan.

Gambar 8. Pengangguran Terbuka Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur, 2009



Dalam upaya mendukung pengarusutamaan gender yang salah satunya diwujudkan dengan memberikan kesempatan yang sama baik kepada laki-laki maupun perempuan untuk terlibat dan aktif dalam berbagai kegiatan pembangunan dan pemanfaatan hasil-hasilnya di segala bidang terutama di sektor pendidikan, kesehatan dan tenaga kerja, pemerintah daerah hendaknya mengupayakan program-program untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam pasar kerja. Upaya meningkatkan keterlibatan perempuan dalam kegiatan ekonomi tentunya secara tidak langsung juga akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan keluarga.

Pengangguran di Kabupaten memiliki karakteristik yang unik karena sekitar 88,68 persen pengangguran justru merupakan pengangguran terdidik yang memiliki ijazah SMA/ sederajat maupun perguruan tinggi. Dan hanya sebesar 7,48 persen pengangguran yang berijazah SD atau tidak memiliki ijazah sama sekali. Fenomena ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dan Dinas Tenaga Kerja khususnya untuk membuka lapangan pekerjaan baru untuk menampung tenaga kerja terdidik ini atau mengarahkan mereka untuk membuka usaha/lapangan kerja sendiri. Dengan demikian tenaga kerja terdidik tersebut dapat diberdayakan dengan optimal untuk mendukung pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan penduduk.

Tabel 17. Jumlah Penduduk Kabupaten Badung Usia 15 Tahun Ke Atas Yang Menganggur Menurut Tingkat Pendidikan, 2007-2009

Tingkat Pendidikan	2007		2008		2009	
	N	%	N	%	N	%
Tidak/blm sekolah	278	2,60	0	0,00	0	0,00
Tidak/blm tamat SD	369	3,45	0	0,00	99	1,29
SD dan sederajat	837	7,82	157	2,09	474	6,19
SLTP dan sederajat	883	8,25	1.087	14,48	317	4,14
SLTA dan sederajat	5.985	55,94	4.832	64,36	4.197	54,78
Perguruan tinggi	2.347	21,94	1.432	19,07	2.574	33,60
Jumlah	10.699	100,00	7.508	100,00	7.661	100,00

Sumber: Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional

BAB VII

KESIMPULAN

1. Rata-rata pengeluaran perkapita penduduk Kabupaten Badung dalam kurun waktu 4 tahun terakhir mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Pada tahun 2006, rata-rata pengeluaran perkapita penduduk sebesar Rp. 426.897,- perkapita per bulan dan pada tahun 2009 ini naik menjadi Rp. 706.732,- perkapita perbulan.
2. Seiring terjadinya peningkatan pendapatan yang di-proxy-kan dari peningkatan pengeluaran, terjadi pergeseran pola konsumsi masyarakat. Semakin tinggi tingkat pendapatan masyarakat, porsi pengeluaran yang digunakan untuk konsumsi makanan akan menurun dan bergeser ke konsumsi non makanan.
3. Konsumsi untuk makanan didominasi oleh pengeluaran untuk konsumsi makanan jadi, sumber protein (ikan, daging, telur dan susu), serta padi-padian. Sementara konsumsi non makanan didominasi oleh pengeluaran untuk keperluan perumahan dan fasilitasnya serta kebutuhan transportasi.
4. Peningkatan pendapatan perkapita penduduk diikuti juga dengan pemerataan tingkat pendapatan yang ditandai dengan penurunan nilai *Gini Ratio* dari 0,2673 pada tahun 2008 menjadi 0,2273 pada tahun 2009. Hal ini juga sejalan dengan peningkatan proporsi pendapatan yang diterima oleh 40 persen penduduk berpendapatan terendah dari 23,32 persen pada tahun 2008 menjadi 25,49 persen pada tahun 2009.
5. Secara absolut jumlah penduduk usia kerja dan jumlah angkatan kerja menunjukkan kecenderungan peningkatan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Namun demikian TPAK justru menurun. Tetapi di sisi lain tingkat pengangguran terbuka dan jumlah pengangguran secara absolut justru mengalami penurunan.
6. Penduduk yang bekerja masih didominasi laki-laki yang sebagian besar terkonsentrasi di sektor perdagangan, pertanian dan jasa. Kualitas pekerja juga menunjukkan perbaikan yang ditandai dengan meningkatnya proporsi pekerja yang berijazah SMA ke atas. Sebagian besar pekerja merupakan buruh/karyawan/pegawai dan hanya 19,95 persen yang berusaha sendiri. Di sisi lain jumlah pekerja tak dibayar/pekerja keluarga masih relatif tinggi.

7. Pengangguran masih didominasi oleh kaum perempuan. Sebagaimana halnya karakteristik pengangguran di negara berkembang, pengangguran di Kabupaten Badung sebagian besar merupakan pengangguran terdidik. Lebih dari 80 persen pengangguran adalah orang-orang yang memiliki ijazah SMA ke atas.

<http://badungkab.bps.go.id>

<http://badungkab.bps.go.id>



Badan Pusat Statistik Kabupaten Badung
Jl. Mulawarman No. 11 Denpasar 80111
Telp : (0361) 437519, Fax : (0361) 411887
E-mail : bps5103@telkom.net